

DETERMINAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Isna Apriliana

Program Studi Akuntansi Universitas Mataram, email : aprilianaisna22@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim : 25 Juli 2019

Revisi pertama : 25 September 2019

Diterima: 11 Desember 2019

Tersedia online : 15 Desember 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden terpilih, yang merupakan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan badan permusyawaratan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Data dianalisis menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan transparansi hanya dipengaruhi secara positif oleh mekanisme pengawasan. Temuan lain penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, namun transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: akuntabilitas,transparansi,kepercayaan masyarakat, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study examines the effect of financial statement presentation, financial statement accessibility and oversight mechanism on the management of village fund allocations and their impact on public trust. Primary data were obtained through the distributing questionnaires to 150 selected respondents, who were technical implementers village financial management and village consultative bodies in Lingsar District, West Lombok Regency. The collected data were analyzed using structural equation modelling. The result of this study indicate that the accessibility of financial statement reporting and oversight mechanism has positive effect on the accountability of village fund allocation, while transparency is positively influenced by oversight mechanism. Other findings of this study state that accountability has a positive effect on public trust, but transparency in managing village fund allocations does not affect public trust. The result of this study indicate that managing village fund allocations that are increasingly accountable plays an important role in public trust.

Keywords : accountability,transparency, public trust, village fund allocation.

©2019 FEB UNRAM. All rights reserved

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Jumlah dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah kepada tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat yang menerima jumlah kucuran dana desa di urutan kelima terbesar adalah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu kecamatan yang mendapat sorotan karena memiliki satu desa terbaik yang mewakili NTB di tingkat nasional adalah Desa Lingsar yang berada di Kecamatan Lingsar. Meskipun Kecamatan Lingsar memiliki satu desa terbaik, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa lain yang ada di Kecamatan Lingsar. Salah satu permasalahan tersebut seperti dikutip oleh Suara NTB, tanggal 21 Agustus 2017 adalah jumlah kepala desa di Lombok Barat dipecat lantaran terbelit berbagai kasus, salah satunya kasus tindak pidana korupsi pungutan liar (pungli). Adapun permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan dana desa adalah berdasarkan data BPK RI, jumlah kepala desa (kades) maupun perangkat desa di Indonesia, termasuk di Lombok Barat yang terjerat kasus terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berbagai penelitian tentang desa sudah banyak dilakukan di Wilayah Indonesia, namun penelitian yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa belum banyak dilakukan. Faktor-faktor ini terdiri dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pengawasan fungsional, audit kinerja, gaya kepemimpinan, kompetensi dan peran perangkat desa. Namun demikian penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan dalam hal ini sistem pengendalian internal. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada pemerintah desa yang ada di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dengan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, mekanisme pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana dkk (2017) tentang determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan *public-stakeholders*. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian di pemerintah daerah serta dampaknya terhadap *public-stakeholders*, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada lingkup wilayah pemerintahan di desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan pengujian determinan akuntabilitas dan transparansi yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Lebih lanjut penelitian ini juga menguji dampak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian ini mengargumentasikan adanya hubungan keagenan antara kepala desa sebagai *agent* yang memperoleh mandat untuk mengelola keuangan desa dengan cara memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban sehingga nantinya akan menimbulkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Secara praktis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajiban sebagai pengelola ADD serta pentingnya partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. Kerangka Teoretis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Legitimasi mengargumentasikan bahwa entitas dianjurkan untuk memberikan atau mengungkapkan bahwa kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat (Maharani dan Yulianto, 2016). Organisasi harus melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : (1) pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa; (2) pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa; (3) pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali dan (4) pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Nasirah, 2016). Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja agar pengendalian dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi akan menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Indikator transparansi adalah ketersediaan sistem informasi, aksesibilitas terhadap alokasi dana desa, publikasi laporan keuangan dan ketersediaan informasi kinerja (Ramadhani, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bisa terwujud salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan. Dalam konteks pelaporan keuangan kepada publik, maka penyajian laporan keuangan daerah yang semakin lengkap, dapat diselesaikan tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu, menyajikan transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11). Laporan keuangan sangat penting karena dapat mengukur sejauh mana kinerja sudah dilaksanakan dan menjadi alat bukti apakah kinerja sudah sesuai dengan kriteria akuntabel. Argumentasi ini sejalan dengan studi Sande (2015), Sumiyati (2015), Somad (2016), Syaifullah (2016), Chrystiana (2017), Nurrizkiana (2017), Rahma (2017), Fauzani (2018), Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/desa. Namun demikian, studi Azizah (2014) dan Sari (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penyajian keuangan yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah serta semakin sesuai dengan SAP maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah (Apriliani, *et al.*, 2015: 8). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Chrystiana (2017), Nurrizkiana (2017) dan Fauzani dkk (2018) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah/desa. Kontradiktif dengan temuan studi sebelumnya, penelitian Azizah (2014) dan Sari (2017) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan alokasi dana desa, penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas akan berdampak pada laporan keuangan yang semakin transparan bagi masyarakat sebagai

stakholder yang dilayani. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani, et al., 2015: 3). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder* (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). Ketika laporan keuangan daerah dapat dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, para pengguna semakin mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*), serta dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula (Lewier dan Kurniawan, 2016: 11).

Temuan studi Sande (2013), Sumiyati (2015), Somad (2016), Syaifullah (2016), Chrystiana (2017), Nurrizkiana (2017), Rahma (2017), Sari (2017), Fauzani (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/desa. Namun demikian, kontradiktif dengan temuan studi sebelumnya penelitian Azizah (2014) dan Hasibuan (2018) mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penyajian laporan keuangan yang baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan tidak berarti, sehingga usaha untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh daerah maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan (Apriliani, et al., 2015:8). Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah/desa sebagaimana dikemukakan dalam studi Azizah (2014), Chrystiana (2017), Nurrizkiana dkk (2017), Sari (2017) dan Fauzani dkk (2018). Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pengaruh Mekanisme Pengawasan Terhadap Akuntabilitas dan Tranparansi

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bisa terwujud salah satunya dengan melakukan mekanisme pengawasan. Berkaitan dengan laporan keuangan, mekanisme pengawasan yang dalam hal ini adalah sistem pengendalian internal akan

berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Pengaruh pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung akan tergambar pada laporan keuangan. Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Azizah (2014), Sari (2017) Hasibuan (2018), Rosyidi (2018) dan Yesinia (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/desa, yang mengindikasikan bahwa pengawasan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berkaitan dengan laporan keuangan, mekanisme pengawasan yang dalam hal ini adalah sistem pengendalian internal akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Pengaruh pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung akan tergambar pada laporan keuangan. Sari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pengawasan akan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Semakin meningkat fungsi pengawasan akan berdampak transparansi pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

H₆ : Mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Serta Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas publik bertujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Nurritziana dkk (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan hal terbaik tanpa kepercayaan kepada pemerintah (Halimatussa'diyah, 2012 dalam Rahmawati, 2013). Penyebab lain ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah pada syarat pelimpahan wewenang masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola pelayanan masyarakat, masyarakat menganggap pemerintah melakukan tindakan-tindakan tidak etis (Ari & Norrbacka, 2009 dalam Rahmawati, 2013) dengan kewenangan yang diberikan. Untuk mencapai kepuasan masyarakat maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah yang berguna untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah (Grosso & Gregg, 2011), karena apabila pemerintah tidak akuntabel dan transparan akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Judith dkk, 2009).

Masyarakat dan pemerintah adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat memerlukan suatu bentuk pemerintahan dan sebaliknya pemerintah memerlukan masyarakat. Untuk membentuk suatu komponen masyarakat yang baik diperlukan pemerintahan yang baik dan untuk membentuk pemerintahan yang baik diperlukan peran serta masyarakat. Pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan hal terbaik tanpa kepercayaan kepada pemerintah (Halimatussa'diyah, 2012 dalam Rahmawati, 2013). Nurrizkiana dkk (2017) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

H₈ : Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan seluruh BPD yang ada di Kecamatan Lingsar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif (Sugiyono, 2016). Adapun pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : (1) sampel adalah yang diambil berasal dari aparatur desa yaitu seluruh aparatur desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yaitu 15 kepala desa, 15 sekretaris desa, 15 kaur keuangan, 15 kasi pemerintahan, 15 kasi kesra dan 15 kasi pelayanan dan (2) sampel yang diambil berasal dari masyarakat yaitu 90 orang BPD yang berada di wilayah Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Kuisisioner menggunakan skala likert dengan pengukuran variabel laten eksogen dan endogen beserta indikator disajikan pada tabel 1. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model struktural yaitu analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Adapun model struktural yang diuji adalah sebagai berikut :

$$AK = \gamma_1 \cdot PLK \cdot ALK \cdot MP + \zeta_1$$

$$TP = \gamma_2 \cdot PLK \cdot ALK \cdot MP + \zeta_2$$

$$KM = \gamma_3 \cdot PLK \cdot ALK \cdot MP + \beta_1 \cdot AK + \beta_1 \cdot TP + \zeta_3$$

Keterangan :

PLK : Penyajian Laporan Keuangan

ALK : Aksesibilitas Laporan Keuangan

MP : Mekanisme Pengawasan

AK : Akuntabilitas Pengelolaan ADD

TP : Transparansi Pengelolaan ADD

KM : Kepercayaan Masyarakat

γ : Gamma, koefisien pengaruh var. eksogen terhadap endogen

β : Beta, koefisien pengaruh variabel endogen terhadap endogen

ζ : Zeta (kecil), galat model structural

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Rujukan
Penyajian Laporan Keuangan	a. Andal b. Relevan c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami	PP No. 71 tahun 2010
Aksesibilitas Laporan Keuangan	a. Keterbukaan b. Kemudahan c. Accesibel	Sande (2013)
Mekanisme Pengawasan	a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian internal	PP No. 60 tahun 2008
Akuntabilitas Pengelolaan ADD	a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum b. Akuntabilitas proses c. Akuntabilitas program d. Akuntabilitas kebijakan	Mardiasmo (2018)
Transparansi Pengelolaan ADD	a. Ketersediaan sistem informasi b. Aksesibilitas terhadap alokasi dana desa c. Publikasi laporan keuangan d. Ketersediaan informasi kinerja	Ramadhani (2011)
Kepercayaan Masyarakat	a. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat b. Partisipasi masyarakat c. Wawasan dan pengetahuan masyarakat d. Ketaatan terhadap aturan e. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat f. Kesadaran masyarakat akan haknya g. Kesesuaian kegiatan-kegiatan pemerintah daerah h. Berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme	Krisnayanti (2013)

4. Hasil dan Pembahasan

Sebelum kuesioner dibagikan kepada semua responden peneliti telah dilakukan *pilot test* terhadap 20 responden yang terdiri dari 10 orang PTPKD dan 10 orang BPD dengan 34 item pernyataan dan untuk menguji validitas digunakan aplikasi SPSS dan hasilnya adalah semua item pernyataan kuesioner valid. Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada responden, yang terdiri dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan responden yang berasal dari masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa (BPD). Dari sejumlah 180 kuesioner yang disebarkan, jumlah kuisisioner yang dikembalikan adalah sebanyak 150. Adapun data sebaran penyebaran kuisisioner kepada responden pada masing-masing di Kecamatan Lingsar disajikan pada tabel 2.

Demografi responden berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pendidikan, lama bekerja, jenis pelatihan yang diikuti disajikan pada tabel 3. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki sebanyak 104 orang atau 69,3% dan responden perempuan sebanyak 46 orang atau 30,6%. Karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun sebanyak 66 atau 43,4%. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 118 atau 78,6% yang artinya secara akademis pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa masih rendah.

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuisisioner

No	Nama Desa	Kuesioner PTPKD	Kuesioner untuk BPD	Kuesioner dikembalikan PTPKD	Kuesioner dikembalikan BPD
1	Desa Peteluan Indah	6	6	5	6
2	Desa Lingsar	6	6	5	6
3	Desa Batu Kumbang	6	6	6	6
4	Desa Batu Mekar	6	6	5	6
5	Desa Karang Bayan	6	6	6	6
6	Desa Langko	6	6	6	4
7	Desa Sigerongan	6	6	6	6
8	Desa Duman	6	6	5	6
9	Desa Dasan Geria	6	6	5	6
10	Desa Gegerung	6	6	5	4
11	Desa Giri Madya	6	6	0	0
12	Desa Gegelang	6	6	6	6
13	Desa Gontoran	6	6	5	5
14	Desa Saribaye	6	6	5	4
15	Desa Bug-Bug	6	6	5	4
Total		90	90	75	75
Persentase		50%	50%	41,6%	41,6%
		100%		83,2%	

Berdasarkan data demografi responden pada tabel 3 dapat diketahui bahwa pengalaman kerja responden paling banyak dengan jumlah 50% adalah antara 1-5 tahun yang menunjukkan cukup berpengalaman dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tupoksinya. Adapun responden dengan pengalaman kerja antara 6-10 tahun berjumlah 30%, sedangkan responden dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun berjumlah 14%. Sebagian besar reponden dengan telah mengikuti berbagai jenis pelatihan terutama yang terbanyak (28%) adalah bimbingan teknis Tupoksi BPD dan peningkatan kapasitas BPD. Selain itu kegiatan pelatihan yang telah diikuti responden berkaitan dengan bimbingan teknis tata cara penyelenggaraan musyawarah desa sebanyak 22%. Diklat yang berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan keuangan desa dan diklat pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar masing-masing 11,3% dan 16%.

Tabel 3 . Demografi Responden

Keterangan	Total	Persentase
Jenis kelamin :		
- Laki-laki	104	69,3%
- Perempuan	46	30,6%
Umur :		
- 20-30 tahun	58	38,1%
- 31-40 tahun	66	43,4%
- 41-50 tahun	18	11,8%
- > 50 tahun	10	6,5%
Pendidikan Terakhir:		
- SD	0	0%
- SMP	0	0%
- SMA	118	78,6%
- D3	3	2%
- S1	28	18,6%
- S2	1	0,6%
- Lainnya	0	0%

Lama Bekerja :		
- < 1 tahun	9	6%
- 1-5 tahun	75	50%
- 6-10 tahun	45	30%
- > 10 tahun	21	14%
Jenis pelatihan yang diikuti :		
- Diklat pengelolaan keuangan desa	17	11,3%
- Diklat pengelolaan alokasi dana desa	24	16%
- Bimtek tata cara penyelenggaraan musyawarah desa	22	14,6%
- Bimtek penyelenggaraan pemerintahan	6	4%
- Bimtek perangkat desa	5	3,3%
- Pelatihan sistem informasi desa	1	0,6%
- Bimtek peningkatan kapasitas BPD	33	22%
- Bimtek tupoksi BPD	42	28%

Hasil evaluasi *outer model* atau model pengukuran diketahui bahwa terdapat 4 indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,5 sehingga tidak memenuhi *convergent validity*, sehingga keempat indikator tersebut harus didropping untuk selanjutnya dilakukan rekalkulasi. Hasil evaluasi tahap II menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* diatas 0,5, sehingga dinyatakan memenuhi *convergent validity*. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk kelima variabel berada di atas 0,7 dan ada satu variabel yang memiliki nilai di bawah 0,7, sehingga semua variabel dapat dinyatakan cukup reliabel.

Tabel 4. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Konstruk	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Penyajian Laporan Keuangan	0.853	0.805
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.873	0.778
Mekanisme Pengawasan	0.562	0.368
Akuntabilitas	0.906	0.860
Transparansi	0.874	0.806
Kepercayaan Masyarakat	0.826	0.749

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap model struktural atau *inner model* pada tabel 5 dapat diketahui hanya variabel aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan yang berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas. Berkaitan dengan transparansi hanya variabel mekanisme pengawasan yang berpengaruh signifikan positif, sedangkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Hanya variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Tabel 5 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value)

Hubungan Variabel	Sampel Asli (O)	Sample Mean (M)	Std.Deviasi (STDEV)	T Statistik ((O/STDEV))
Penyajian Laporan Keuangan → Akuntabilitas	-0.021	-0.029	0.115	0.185
Penyajian Laporan Keuangan → Transparansi	0.170	0.158	0.136	1.245
Aksesibilitas Laporan Keuangan → Akuntabilitas	0.297	0.308	0.099	2.992*
Aksesibilitas Laporan Keuangan → Transparansi	0.046	0.047	0.113	0.413
Mekanisme Pengawasan → Akuntabilitas	0.400	0.411	0.094	4.259*
Mekanisme Pengawasan → Transparansi	0.304	0.310	0.116	2.615*
Akuntabilitas → Kepercayaan Masyarakat	0.311	0.294	0.146	2.128*
Transparansi → Kepercayaan Masyarakat	0.048	0.038	0.177	0.273

Hasil evaluasi terhadap *goodness of fit* menunjukkan nilai *R-square* untuk akuntabilitas sebesar 0,288 yang dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabel konstruk penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan sebesar 28,8%, sedangkan sisanya 71,2% dijelaskan oleh variabel diluar model yang dispesifikasikan sebagaimana disajikan pada tabel 6. Untuk nilai *R-square* transparansi sebesar 0,180 dapat diinterpretasikan bahwa transparansi dapat dijelaskan oleh variabel konstruk penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan sebesar 18%, sedangkan sisanya 82% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Untuk nilai *R-square* kepercayaan masyarakat sebesar 0,196 dapat diinterpretasikan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel konstruk akuntabilitas dan transparansi sebesar 19,6%, sedangkan sisanya 80,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 6. *R-Square*

Variabel	R Square
Akuntabilitas	0.288
Transparansi	0.180
Kepercayaan Masyarakat	0.196

Hasil pengujian hipotesis terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menemukan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien parameter sebesar -0,021 dan tidak signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik dibawah 1,65 yaitu sebesar 0.185. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sande (2013), Sumiyati (2015), Chrystiana (2017), dan Nurritziana (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan alokasi dana desa. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah (2014) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian lainnya mengungkapkan terdapat pengaruh negatif antara penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan koefisien parameter 0.170 dan tidak signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik dibawah 1,65 yaitu sebesar 1.245. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrystiana (2017), Nurritziana (2017) dan Fauzani dkk (2018) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/desa. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah (2014) dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan koefisien parameter 0.297 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 2.992. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013), Sumiyati (2015), Chrystiana (2017), dan Nurritziana (2017) yang

menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan alokasi dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Azizah (2014) dan Hasibuan (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan koefisien parameter 0.046 dan tidak signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik dibawah 1,65 yaitu sebesar 0.413. Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014), Chrystiana (2017), Nurrizkiana (2017) dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan alokasi dana desa. Namun demikian hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan koefisien parameter 0.400 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 4.259. Dengan demikian hipotesis 5 yang menyatakan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014), Sari (2017), Hasibuan (2018), Rosyidi (2018) dan Yesinia (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun desa. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara mekanisme pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan koefisien parameter 0.304 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 2.615 yang berarti ada pengaruh antara keduanya. Dengan demikian hipotesis 6 yang menyatakan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan koefisien parameter 0.311 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 2.128 yang berarti ada pengaruh antara keduanya. Dengan demikian hipotesis 7 yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Namun demikian hasil penelitian ini menemukan pengaruh negatif tidak signifikan antara transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dengan koefisien parameter 0.048 dan tidak signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik dibawah 1,65 yaitu sebesar 0.273. Dengan demikian hipotesis 8 yang menyatakan transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Nurrizkiana dkk (2017) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya semakin mudah masyarakat dalam mengakses laporan keuangan dan semakin baik mekanisme pengawasan maka akan semakin akuntabel pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Penelitian ini juga membuktikan bahwa mekanisme pengawasan berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa, yang artinya semakin baik mekanisme pengawasan maka akan semakin baik pula transparansinya, meskipun penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh. Hal ini mengindikasikan kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyajikan laporan keuangan sehingga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa juga rendah. Aksesibilitas laporan keuangan yang tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa mengindikasikan kurangnya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses laporan keuangan. Temuan lain penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, yang artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat akan semakin baik. Namun demikian transparansi tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang artinya kurangnya transparansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Implikasi penelitian ini mengarah pada peran penting akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diwujudkan dalam bentuk kemudahan aksesibilitas laporan keuangan dan adanya mekanisme pengawasan yang baik terhadap pengelolaan ADD. Ketika pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan akuntabel maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai *stakeholders* yang dilayani. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat ditindaklanjuti penelitian mendatang dengan mengeksplorasi variabel lainnya yang diprediksi mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, misalnya pengawasan fungsional, audit kinerja dan kompetensi aparat desa. Penelitian mendatang dapat memperluas sampel dan menguji faktor kontekstual karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda.

Referensi

- Apriliani, N.K.A, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program SI., 3 (1)*.
- Azizah, Nur. 2014. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal*. Universitas Trunojoyo Madura
- Chrystiana, Ema Tietien. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana*

Desa (ADD) Di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
Skripsi. IAIN Surakarta

- Fauzani, Faza Meila, Atiek Sri Purwati dan Sudjono. 2018. *Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto, 19 September 2018
- Hasibuan, Nurul Hidayah. 2018. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.* Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. 2016. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.* S1 Thesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maharani, A.K. & Agung Yulianto. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Accounting Analysis Journal*, 5 (1), 1-8.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurrizkiana, Baiq, Lilik Handajani dan Erna Widiastuty. 2017. Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18 (1), 28-47.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Ramadhani. 2011. *Persepsi Stakeholder Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan layanan Umum.* Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Rahma, Nuria. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 4 (2), 4309-4323.
- Rahmawati, N. E. 2013. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder. *Tesis.* Universitas Gadjah Mada.
- Rosyidi, Muhammad. 2018. Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 1 (1), 1-14
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 1-20.
- Sari, Embun Widya. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4 (1), 571-586.

Somad, Abdus. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 4 (2).

Sumiyati., Zulfahridar & Devi Safitri. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, 2 (2), 1-15

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung. *e-Journal Pemerintahan Integratif*, 1 (1), 51-64.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

www.suarantb.com, diakses tanggal 27 November 2018. Senin, 16.00 WITA

Yesinia, Nur Ida, Norita Citra Yuliarti & Dania Puspitasari. 2018. analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Aset 10 (1)*, 105-112.